

## **KEMUDAHAN INVESTOR DALAM PROSES INVESTASI MODAL ASING DI BANTEN**

**Rina Yulianti**

Email : [rina.antinas@gmail.com](mailto:rina.antinas@gmail.com)

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang Banten**

***Abstracts** : Investment is the investment made by local and international companies. And Banten is one area that many ogled for investment, so Banten had to do a lot of preparation to provide convenience services. With the increase in the area of investment will be realized if there is a potential area that can be "sold" to investors, whether it be natural resources and potential of human resources. The next thing that is very important is the ability to sell potential. The ability to sell must be supported by the creation of a conducive environment and support areas such as investment; the guarantee of security and legal certainty for investment, as well as excellent public service delivery. If Banten wants advanced economies, the economy must always improve to increase capital investment and quality of human resources, and increase prosperity and create jobs. This research approach using qualitative methods. Banten is an area with a fairly high industrial growth, thus making parties interested in investing. The results showed that with ease in providing one-stop service and not a lot of bureaucracy that is passed so as to make investors happy. This is certainly an impact on investment into Banten. So as to increase rather than the economy Banten, and absorption of human resources in the field of work.*

***Keywords** : Local Government, Foreign Capital Investment Easiness*

### **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik adalah bekerjanya produk administrasi secara keseluruhan. Keberadaan dan esensi sistem administrasi negara sejatinya sangat mudah diukur, apakah hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan baik.

Dengan kata lain, baik buruknya suatu pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh kualitas sistem administrasi negara yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagai sebuah sistem, administrasi negara sangat dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lainnya seperti subsistem ekonomi, hukum,

politik, sosial dan budaya. Keseluruhan subsistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tugas negara dalam memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Kegagalan pembangunan dan pelayanan publik disebabkan oleh ketidakmampuan pemimpinnya melakukan perubahan terhadap sistem administrasi negaranya. (Prasojo,2008)

Jenis pelayanan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut: pertama, kelompok pelayanan administrative, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kedua, kelompok pelayanan barang. Ketiga, kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan penyelenggaraan transportasi. (Ratminto dan Winarsih: 2008:20)

Pada kelompok pelayanan administrative, salah satu jenis pelayanan umum yang diberikan oleh birokrasi adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor bagi berkembangnya

investasi. Guna mendukung iklim investasi, sektor perizinan menjadi hal penting untuk diperbaiki, karena selama ini pelayanan perizinan masih dianggap masih kurang. Banten sendiri memiliki sumberdaya alam, pelabuhan internasional, dan lokasinya yang dekat dengan ibukota negara, Banten dapat menjadi salah satu tujuan utama investasi baik domestik maupun asing.

Pengembangan suatu daerah atau kawasan, selain harus didukung oleh sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang memadai, juga diperlukan kegiatan promosi dan publikasi, terutama terkait dengan upaya untuk meraih dukungan investasi dan pasar baik domestik maupun internasional.

Selain industri manufactur yang ada di Banten, juga ada sumber daya alam yang dimiliki Banten dan banyak diminati oleh investor asing atau Penanam Modal Asing (PMA), sektor itu meliputi Pertanian, dengan tanaman pangan, seperti padi, kacang, jagung, singkong, sayuran, jahe, dan lain-lain. Juga bidang peternakan, seperti kerbau, sapi, ayam, kambing; lalu perkebunan, seperti kelapa, kelapa sawit, cokelat, karet, melinjo, aren, buah tropis,

kayu/hutan. Ada juga perikanan, meliputi, perikanan tangkap, ikan, udang, kerang, rumput laut.

Keberlimpahan kandungan dan pesona alam, tentunya membutuhkan dukungan finansial dalam mengolah dan mengembangkannya. Secara geografis Propinsi Banten terletak pada posisi yang sangat strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia dan sebelah barat perbatasan dengan selat Sunda. Selain itu Propinsi Banten juga sebagai terdekat dari DKI, Jawa Barat, dan Lampung serta dilalui koridor lalu lintas darat Jawa Sumatera.

Secara nasional Propinsi Banten merupakan salah satu daerah tujuan investasi yang banyak menarik pihak investor. Hal ini dapat dimaklumi karena letaknya yang sangat strategis tersebut. Dengan kepadatan penduduk DKI Jakarta yang semakin meningkat dan kesediaan lahan untuk industri yang semakin terbatas, Propinsi Banten menjadi wilayah pilihan bagi para investor untuk membangun dan memperluas usahanya di bidang industri dan properti.

Saat ini dalam mengembangkan perekonomian daerahnya, pemerintah

Propinsi Banten mendorong kegiatan investasi di sektor sekunder dan tersier. Pengembangan kegiatan investasi tersebut ditempatkan di wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon. Sedangkan di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang dikembangkan sektor primer dan pariwisata. Untuk sektor tersier, pemerintah Propinsi Banten telah menyediakan 17 kawasan industri yang tersebar di Kota dan Kabupaten Tangerang, Serang dan Cilegon dengan potensi lahan yang belum dimanfaatkan seluas lebih dari 5.000 Ha. Hal ini berarti bahwa ketersediaan lahan cukup luas bagi para investor untuk membangun atau memperluas usahanya di Propinsi Banten (BKPM: 2012)

### **Peluang Investasi di Provinsi Banten**

Banten merupakan wilayah yang sangat dekat dengan pemerintahan ibukota, sehingga membuat wilayah ini sangat mudah untuk di datangi. Hal ini menjadi salah satu keunggulan daripada Banten. Selain itu Banten juga termasuk wilayah yang perkembangannya sangat pesat terutama di bidang industri dan pariwisata. Sehingga banyak dilirik oleh negara asing untuk ber-investasi. Tentunya hal

ini tidak akan dilepas begitu saja, apalagi faktor wilayah yang dekat dengan pemerintahan pusat, membuat banyak negara melirik Banten.

Tujuh negara berminat melakukan investasi di Banten. Ketujuh Negara itu adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Ghana, Nigeria dan China. Negara-negara tersebut berminat investasi pada bidang pelabuhan, infrastruktur dan KEK pariwisata di Banten. Seperti disampaikan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT, 2015) Selain Banten, Pemerintah RI melalui BKPM RI juga mengajak Provinsi Banten, Lampung, dan Jawa Timur. Di Banten peluang investasi, di antaranya KEK Tanjung Lesung, Pelabuhan Bojonegara, dan Tol Serang-Panimbang. Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan kemudahan berinvestasi di Banten. Bahkan, Banten selalu masuk lima besar tujuan investasi, baik PMA (penanaman modal asing) maupun PMDN (penanaman modal dalam negeri).

Selain itu Negara Saudi Arabia berminat melakukan investasi di bidang kesehatan, yakni untuk membangun

rumah sakit Islam di Banten. Karena warga Banten mayoritas banyak umat muslim dan lokasi wilayah Banten tidak jauh dari bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sedangkan Uni Emirat Arab berminat di pelabuhan, infrastruktur, jalan tol dan pariwisata. Nigeria dan Ghana berminat melakukan invetasi di bidang veterelogi, masalah perminyakan di Lebak, sementara Pakistan di sektor pertanian.

Menurut BKPMPT ketujuh negara itu mempertanyakan kepastian hukum soal investasi, hak guna tanah atau lahan serta lamanya proses perizinan. Mereka sangat antusias untuk melakukan investasi di Banten, oleh karena itu mereka juga tidak mau investasi yang akan mereka lakukan akan menjadi ganjalan kalau kepastian hukumnya tidak terpenuhi dan proses izin yang lama. Negara-negara ini menginginkan kemudahan dalam hal berinvestasi.

Keberhasilan Banten dalam menarik minat investasi asing tidak terlepas dari semangat para badan yang mengurus investasi dalam memberikan pelayanan kepada para investor. Pelayanan yang dimaksud juga mencakup kemudahan perizinan

investasi di Provinsi Banten. Diberlakukannya kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menerapkan pelayanan di satu tempat dengan prinsip mempermudah pelayanan perizinan investasi, semakin mendorong para investor menanamkan modalnya di Banten, terutama penanam modal asing (PMA). Perizinan yang mudah disertai pelayanan yang bagus diyakini akan terus menarik investor asing. Tidak berlebihan jika hingga kini, Banten masih menjadi primadona bagi investor asing (PMA).

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis oleh BKPMPT tentang realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode Triwulan III (Agustus-Oktober) Tahun 2014 realisasi di Banten masih cukup tinggi. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode Triwulan III (Agustus-Oktober) Tahun 2014 mencapai Rp. 4,7 triliun dengan 187 proyek berada dan di posisi 5 secara nasional. Selanjutnya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berada di posisi 12 secara nasional dengan 20 proyek dan nilai investasi mencapai Rp.

1,4 triliun. Seperti tahun – tahun sebelumnya realisasi PMA di Provinsi Banten lebih besar dibanding dengan PMDN. Hal tersebut mengindikasikan Banten masih menjadi primadona penanam modal luar negeri.

### **Wilayah Investasi dan Sektor Usaha**

Dari sebaran investasi berdasarkan wilayah pada Triwulan III (Agustus-Oktober) Tahun 2014, porsi realisasi investasi tertinggi PMA berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 82 proyek dengan nilai investasi 65.375,4 ribu US\$, selanjutnya berturut-turut Kota Tangerang sebanyak 41 proyek dengan nilai investasi sebesar 11.606,4 ribu US\$, Kabupaten Serang sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi sebesar 199.400,4 ribu US\$, Kota Cilegon sebanyak 17 proyek dengan nilai investasi sebesar 60.206,7 ribu US\$, Kota Tangerang Selatan sebanyak 15 proyek dengan nilai investasi sebesar 1.369,9 ribu US\$, dan Kabupaten Lebak sebanyak 5 proyek dengan nilai investasi sebesar 110.620,9 ribu US\$. Pada PMDN, Kabupaten Tangerang juga menempati urutan pertama sebagai tempat tujuan investasi. Diketahui, total investasi Kabupaten Tangerang

mencapai Rp. 152.233,8 juta dengan 10 proyek, Kota Cilegon total investasi sebesar Rp. 1.105.108,2 juta dengan 4 proyek, Kabupaten Serang total investasi sebesar Rp. 138.030 juta dengan 4 proyek.

Untuk Sektor Usaha, di Provinsi Banten mayoritas PMA bergerak di sektor industri, perdagangan dan reparasi dengan total 46 proyek atau sekira 24,5 persen dari total keseluruhan proyek dengan nilai investasi sebesar 11051,7 (ribu) US\$. Sementara untuk PMDN sektor usaha berada pada bidang industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan total 9 proyek atau 45 persen dari proyek keseluruhan dengan nilai investasi sebesar Rp. 152,233,8 juta. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima oleh BKPM Provinsi Banten, realisasi proyek Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan III (Agustus-Oktober) Tahun 2014 sebanyak 187 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 4,7 triliun. Sementara Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sebanyak 20 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 1,4 triliun. Perlu diketahui, secara nasional saat ini masih Banten menempati

peringkat ke-5 setelah Jawa Timur dengan total investasi sebesar 448,6 \$ atau sekira Rp. 4,9 triliun. Sementara untuk PMDN, Banten menempati peringkat ke-12 dengan total investasi sebesar Rp. 1,4 triliun.

Sementara itu, berdasarkan negara yang menginvestasikan modalnya di Provinsi Banten, Singapura merupakan negara dengan nilai investasi tertinggi yang mencapai 151.838,7 (ribu) US\$ dengan 20 proyek, disusul Konsorium (Gabungan Negara) sebesar 191.008,7 (ribu) US\$ dengan 39 proyek, Malaysia sebesar 29.184,8 (ribu) US\$ dengan 11 proyek, Hongkong (termasuk RCC) mencapai 26.521,4 (ribu) US\$ dengan 5 proyek, Jepang mencapai 8.395,2 (ribu) US\$ dengan 22 proyek. Selebihnya (negara investor), realisasi investasi dibawah 8.000 (ribu) US\$ dengan rata-rata 7-1 proyek. Keberadaan investor di Provinsi Banten telah menyerap tenaga kerja secara signifikan. Untuk Januari-September 2014 tenaga kerja yang berhasil diserap mencapai 98813 tenaga kerja. Yang terdiri dari PMA menyerap 92191 tenaga kerja dan PMDN menyerap 6622 tenaga kerja.

Realisasi Triwulan III 2014: Berdasarkan Lokasi

PMA		
WILAYAH	2014	
	Poyek	Investasi (US\$. Ribu)
Kabupaten Serang	27	199.400,4
Kabupaten Lebak	5	110.620,9
Kabupaten Tangerang	82	65.375,4
Kota Cilegon	17	60.206,7
Kota Tangerang	41	11.606,4
Kota Tangerang Selatan	15	1.369,9
<b>JUMLAH</b>	<b>187</b>	<b>448.579,7</b>

PMDN		
WILAYAH	2014	
	Poyek	Investasi (Rp. Juta)
Kota Cilegon	4	1.105.108,2
Kabupaten Tangerang	10	152.233,8
Kabupaten Serang	4	138.030
Kabupaten Lebak	1	0
Kota Tangerang	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>1.395.372</b>

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten

Peringkat Investasi Nasional Triwulan III 2014

PMA				PMDN			
NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	DKI Jakarta	1.482,3	627	1	Jawa Timur	11.428,5	96
2	Jawa Barat	1.434,4	443	2	Kalimantan Timur	4.480,2	15
3	Sulawesi Tengah	1.046,6	25	3	Sumatera Selatan	3.371,8	9
4	Jawa Timur	498,1	124	4	Jawa Barat	3.306,9	68
5	Banten	448,6	187	5	Lampung	3.121,8	5
6	Kalimantan Timur	396,1	48	6	Jawa Tengah	2.535,3	42
7	Sumatera Selatan	312,6	50	7	DKI Jakarta	2.201,4	48
8	Papua	305,7	17	8	Sulawesi Selatan	1.890,9	18
9	Kalimantan Tengah	247,1	29	9	Kalimantan Selatan	1.698,8	14
10	Sumatera Utara	200,3	74	10	Riau	1.627,6	13
11	Bali	167,4	163	11	Kalimantan Barat	1.419,1	31
12	Riau	156,0	39	12	Banten	1.395,4	20

Motivasi ketertarikan PMA untuk menginvestasikan di Banten. menjelaskan keberhasilan Banten dalam menarik minat investasi asing tidak terlepas dari semangat para badan yang mengurus investasi dalam memberikan pelayanan kepada investor. Pelayanan itu mencakup kemudahan perizinan investasi di Provinsi Banten. Selain itu juga keterbukaan masyarakat Banten akan masuknya investor asing dan khususnya pengusaha daerah yang bisa bekerjasama dengan para PMA dan tentunya pemerintah daerah. Karena hal ini akan membuat perekonomian di Banten semakin maju dan juga bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Apalagi Banten sangat terbuka dengan investor asing yang ingin menanamkan modalnya. Selain itu Banten juga meminta agar para investor dapat mengikuti peraturan terkait investasi sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Hingga kini Banten masih menjadi primadona bagi investor asing, sehingga tidak heran Banten 2014 menduduki peringkat ke lima

secara nasional. Keberhasilan investasi akan berdampak sistematis pada bidang lain, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat, selain membutuhkan aparatur yang kompeten, juga regulasi perizinan estasi yang mendukung. Sesuai dengan visi PTSP yang menjamin terselenggaranya pelayanan dengan mudah, nyaman dan profesional.

### **Investasi di Provinsi Banten dalam Menghadapi MEA**

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang akan dimulai pada Desember nanti tentu akan berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia dan daerah, tak terkecuali pembangunan ekonomi di Banten. Terbukanya gerbang pasar bebas pada MEA 2015, secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan investasi di Provinsi Banten yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian di Banten. Sebagai wilayah yang banyak dilirik



investor, Banten harus menyiapkan strategi agar peningkatan penanam modal di Banten selaras dengan peningkatan ekonomi di kalangan pelaku usaha menengah (UMKM), pemerintah harus memberi ruang bagi ekonomi kreatif di Banten.

Penguatan ekonomi kreatif dalam menghadapi MEA akan berdampak pada kondusifitas kegiatan investasi di Banten, bahkan pertumbuhan penanaman modal berdampak pada peningkatan ekonomi mikro dan menengah. Untuk menciptakan daya saing kegiatan perekonomian di Banten, banyak aspek yang perlu dibenahi, mulai dari dukungan infrastruktur, proses perizinan, dan tata kelola birokrasi. Komponen-komponen tersebut berperan penting dalam mendukung kegiatan investasi di Banten. Semisal, kegiatan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung secara langsung akan membuka peluang bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mempromosikan produknya.

Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) merupakan momentum dalam menciptakan iklim investasi

dan iklim usaha yang kondusif, sehingga arus modal ASEAN bisa terdorong ke wilayah Banten. Untuk itu, pembenahan layanan perizinan dan dukungan infrastruktur mutlak dilakukan Pemerintah Provinsi Banten. Masyarakat Ekonomi Asian tidak hanya akan menguntungkan industri skala besar, industri rumahan (UMKM-red) juga akan ikut dalam percaturan pasar Asian ini. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro dan menengah harus berupaya meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

### **Pelayanan Birokrasi Publik dalam Investasi**

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mereformasi pelayanan adalah melalui pendekatan *New Publik Service (NPS)*. NPS mencoba menemukan kembali makna kepada siapa sesungguhnya pelayanan itu diberikan. Nilai yang paling utama dalam NPS adalah orientasinya terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara untuk memperoleh setiap jenis pelayanan

dengan baik. Pemerintah daerah harus memiliki pemahaman tentang berbagai paradigme penyelenggaraan pemerintah modern dan menjadikannya sebagai landasan berpijak untuk melakukan reformasi birokrasi di semua tingkatan.

Berikut ini diuraikan secara singkat prinsip-prinsip NPS yang dikembangkan oleh Denhardt dan Denhardt (2007), antara lain :

1. Melayani daripada mengawasi
2. Kepentingan publik merupakan tujuan, bukan efek samping
3. Berpikir secara strategis, bertindak secara demokratis
4. Melayani warga Negara, bukan pelanggan.
5. Akuntabilitas tidaklah sederhana
6. Menghargai orang, bukan sekedar produktivitas
7. Menghargai warga Negara dan pelayan publik lebih dari orientasi bisnis.

Dasar teoritis pelayan publik yang ideal menurut paradigme *New Publik Service* yaitu pelayanan publik yang responsive terhadap

berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas. Dengan demikian karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas mengatakan bahwa pelayan publik yang baik tentu akan membuka peluang sangat besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Banten. Dengan pelayanan maksimal yang diberikan dan kemudahan yang didapat tentu akan membuat para investor merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Banten.

### **Kemampuan Dalam Pelayanan**

Sumber daya manusia merupakan variabel yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan.

Kegagalan utama penerapan suatu kebijaksanaan dilihat dari sumber daya manusia baik itu jumlah pegawai yang tidak mencukupi maupun kemampuan aparat yang rendah. Oleh karena itu, kemampuan aparat pelaksana kebijakan memegang peranan yang sangat penting.

Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan mental. Tujuh dimensi yang paling sering dikutip yang membentuk kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perceptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan daya ingat. Pekerjaan membebankan tuntutan-tuntutan berbeda kepada pelaku untuk menggunakan

Istilah kemampuan kerja biasanya menunjukkan potensi untuk melaksanakan suatu tugas yang mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan. Ini menunjukkan pada

apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang dan bukan apakah ia mengerjakan pekerjaan itu.

Dalam kehidupan berorganisasi, setiap karyawan dituntut untuk mempunyai kemampuan kerja yang tinggi, dalam arti memiliki kecakapan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan. Tercapainya tujuan organisasi dipengaruhi oleh tujuan individu, yaitu pendayagunaan karyawan secara optimal melalui latihan dan pengembangan. Kemampuan merupakan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman.

Pendidikan yang pernah diikuti akan sangat mempengaruhi kemampuan baik dalam hal keterampilan maupun pengetahuan yang dikuasai. Besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kemampuan dapat dilihat dari pengertian pendidikan itu sendiri, antara lain dikemukakan oleh Payaman sebagai berikut :  
“Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu” (Payaman,1984:144).

Kemampuan kerja sangat dibutuhkan, dengan masuknya investor ke Banten tentu akan membutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kalau investasi dalam bidang industri tentu akan banyak kebutuhan kemampuan manusianya dalam bidang teknik, sedangkan dalam bidang pariwisata tentu akan membutuhkan kemampuan dalam bidang lainnya.

### **Penyelenggaraan Pemberian Ijin Investasi di Propinsi Banten**

Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat tiga kebijakan yang perlu diperhatikan,

- 1) *Regulasi*. Dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang memberikan keuntungan atau kemudahan dalam melakukan investasi dan penanaman modal
- 2) *Insentif*. Terkait dengan keinginan investor untuk mendapatkan insentif baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 18 ayat 4, fasilitas yang akan diberikan pemerintah antara lain potongan PPh melalui pengurangan penghasilan neto, pembebasan atau keringanan Bea Masuk (BM) barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Kecuali itu, pembebasan atau keringanan BM bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal, serta penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Adapun kriteria penerima insentif dalam UU Penanaman Modal adalah industri yang menyerap banyak tenaga kerja, berskala prioritas tinggi, bergerak dibidang pembangunan infrastruktur atau alih teknologi, dan juga bergerak pada industri pionir. Industri tersebut juga harus berada di daerah terpencil,

daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu. Bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup, dan industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Kriteria lainnya, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi serta harus bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah.

Sementara itu bentuk insentif yang diberikan oleh BKPM Propinsi Banten saat ini masih sebatas memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan perijinan atau persetujuan usaha.

- 3) *Jaminan keamanan.* Investor hanya mau menanamkan modalnya jika ada jaminan keamanan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat local. Factor politik, ekonomi dan keamanan suatu Negara sangat mempengaruhi investor jika ingin menanamkan modal di Indonesia. Di tingkat

daerah / local, investor menginginkan adanya jaminan keamanan berusaha. Di Indonesia sering terjadi aksi demo yang dilakukan oleh penduduk local yang menginginkan putra daerah atau penduduk local untuk menjadi pegawai pada perusahaan yang akan berdiri. Oleh karena itu, biasanya pemerintah daerah dalam hal ini lurah dan camat meminta kepada perusahaan untuk memberikan persentase memperkerjakan penduduk local. Dan meminta kepada penduduk local untuk ikut menjaga perusahaan yang ada di lingkungan mereka.

### **Ijin Tingkat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal di Daerah, setiap perusahaan PMA/PMDN wajib memiliki izin-izin Daerah yang diperlukan, terdiri dari

1. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan
2. Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah

3. Izin Mendirikan Bangunan/izin Penggunaan Bangunan.
  4. Izin Undang-undang Gangguan
  5. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Guna melengkapi pembuktian kepemilikan tanah yang merupakan asset perusahaan, disarankan juga agar menyelesaikan Hak Atas Tanah/Sertifikat Tanah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Propinsi Banten menyelenggarakan beberapa jenis pelayanan perijinan investasi, yaitu :

- 1) Surat persetujuan penanaman modal baru bagi PMA/PMDN

**Persyaratan :**

- Surat permohonan/Bukti diri pemohon : a) fotocopy akte pendirian perusahaan, b) fotocopy anggaran dasar, dan c) fotocopy KTP.
- Surat kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan pemohon bukan dilakukan direksi
- Fotocopy NPWP.

- Uraian proses produksi dan uraian kegiatan usaha
- Bagi usaha yang dipersyaratkan kemitraan : a) kesepakatan perjanjian tertulis mengenai kesepakatan dengan usaha kecil, b) Akta pendirian atau peubah atau risalah RUPS mengenai penyertaan usaha kecil.

**Prosedur**

1. Menyerahkan berkas permohonan persetujuan yang disampaikan kepada BKPM propinsi kepada BKPM Banten rangkap 2
2. Berkas permohonan diproses (diteliti dan diperiksa)
3. Rapat persetujuan
4. Menyampaikan SK SP kepada pemohon dan tembusan kepada penanaman modal dan investasi terkait. Jika dalam waktu 3 tahun sejak tanggal SP dikeluarkan tidak ada realisasi proyek, maka SP dengan sendirinya batal.

Biaya : belum ada ketentuan

Waktu : 10 hari kerja

- 2) Surat persetujuan perluasan

- 3) Surat persetujuan perubahan
  - a. Perubahan lokasi
  - b. Perubahan bidang usaha dan produksi
  - c. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan
  - d. Perubahan penggunaan tenaga kerja
  - e. Perubahan kepemilikan saham PMA
  - f. Perubahan status PMA menjadi PMDN
  - g. Perubahan status PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA
  - h. Perubahan nama perusahaan
  - i. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek PMA/PMDN
- 4) Surat persetujuan fasilitas kepabeanan
- 5) Ijin usaha tetap (IUT) industry/perdagangan
- 6) Angka pengenal importer terbatas
- 7) Ijin kerja tenaga asing

elain dengan prosedur yang ada, juga pada tahun 2015 ini,

Banten ingin lebih mengembangkan lagi proyeksi apa yang dapat membuat investor lebih rajin untuk berkunjung ke Banten dan melakukan investasi, dengan memberikan kemudahan berinvestasi selain juga pemerintah ingin agar masyarakat lebih sejahtera dan membuka lapangan pekerjaan.

Provinsi Banten merupakan daerah yang memiliki andil besar dalam menopang perekonomian nasional. Banten menjanjikan wilayah cukup aman bagi kalangan pengusaha untuk berinvestasi. Bermodal keyakinan itulah, Provinsi Banten ikut serta menawarkan potensi 10 proyek investasi unggulan kepada para calon investor. Adapun proyek investasi yang ditawarkan itu meliputi:

1. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Bojonegara
2. Pembangunan Jalan Tol Cilegon - Bojonegara
3. Pembangunan Jalan Kereta Cilegon - Bojonegara
4. Pembangunan Jalur Transportasi Moda Monorel

Serpong - Bandara Soekarno  
Hatta

5. Pembangunan Jalan Tol  
Serang - Panimbang
6. Pembangunan Terminal  
Transit Bojonegara
7. Pembangunan Pembangkit  
Listrik Tenaga Panas Bumi
8. Pembangunan Tanjung  
Lesung Waterfront City
9. Pembangunan Industri  
Kerang
10. Pembangunan Industri  
Rumput Laut

Di Provinsi Banten, Bojonegara merupakan proyek investasi yang akan diakselerasi pertumbuhannya terutama oleh pelabuhan laut yang terintegrasi dengan kawasan industri dan terminal petikemas. Feasibility Study atas proyek ini telah dirampungkan dengan lahan yang tersedia seluas 500 hektar dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Selain itu banyak sektor yang sebelumnya sudah dilirik oleh investor asing dan sampai saat ini sudah terealisasi. Diantaranya investor asing yang sudah masuk ke

Banten dan merupakan investor besar di dunia yaitu:

- Blue Scope Steel (Steel) - Australia;
- Dystar (Chemical) - German;
- Asahimas Chemical (Chemical) - Japan;
- Charoen Phokpand (Poultry) - Thailand;
- Nikomas Gemilang (Shoes) - Taiwan;
- Korindo Utama (Automotive) - Republic of Korea;
- Daekyung Indah Heavy Industry (Metal) - Republic of Korea;
- Dong Jin Indonesia (Chemical) - Republic of Korea;
- Baiksan Indonesia (Chemical) - Republic of Korea;
- Japfa Comfeed (Food) - Thailand;
- Tifico (Textile) - Japan;
- Surya Toto (Sanitary) - Japan;
- Siloam Gleneagles (Hospital) - Singapore;
- Swiss-German University (Education) - Germany;



- Cabot (Chemical) - USA;
- Banten Bay Refinery (oil Refinery) - Iran.

## **Simpulan**

Perbaikan kinerja pelayanan birokrasi akan berdampak tumbuhnya kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk menanamkan investasinya di Propinsi Banten sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi pengangguran di Propinsi Banten. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan meningkatkan pemerintahan dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun, sehingga legitimasi BKPM sebagai sebagai tempat penanaman modal semakin lebih kuat. Apalagi Banten termasuk wilayah yang diminati oleh negara luar untuk berinvestasi. Selain itu kemudahan berinvestasi yang diberikan di Banten juga dapat membuka kompetisi yang sehat antara pemilik modal, yaitu bagaimana mereka mendapatkan keuntungan tetapi juga dapat

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Banten.

Selain itu dengan ada MEA pemerintah daerah juga harus lebih waspada dengan akan membanjirnya produk-produk asing. Oleh karena itu harus di persiapkan dan diperdayakan UMKM yang ada, karena salah satu yang akan menompang perekonomian adalah UMKM yang kreatif. Selain itu pemerintah daerah juga harus siap bersaing dan lebih berhati-hati di dalam mengajak investor yang akan menanamkan modalnya di Banten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Chung, Kae H dan Leon C Meggison. 1991. *Organization Behavior Development Manajerial Skill*. Harper and Row Publisher, New York

Denhardt dan Denhardt. 2007. *The New Public Service, Serving Not Steering*. M.E Sharpe, USA

Direktori. 2008. *Peluang Investasi di Propinsi Banten*. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di*

Indonesia. Gajah Mada  
University Press, Yogyakarta

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Cetakan IV*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Mohammad, Ismail. 2003. *Pelayanan Publik dalam Era Desentralisasi*. (Deputi II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara). Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Bappenas (18 Desember 2003).

Purwanto, Erwan Agus. 2008. *Merumuskan Kembali Agenda Pembangunan Budaya Birokrasi*. Makalah Dies XV dan Temu Alumni MAP UGM dengan KR.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2008. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Saragih, Ferdinan D. 2006. *Menciptakan Pelayanan Publik yang Prima Melalui Metode Benchmarking Praktis*. Jurnal Bisnis dan Birokrasi Vo. XIV No. 3

## **Dokumen**

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 2012 dan 2014

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal